



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Media Manado (Media Online)

Minggu, 4 September 2022

Triliunan Rupiah Berpotensi Masuk Minut Tahun 2023



MINUT, Mediamanado – Berbagai langkah dan upaya percepatan melakukan pembangunan Kabupaten Minahasa Utara oleh JG-KWL, patut diapresiasi.

Bagaimana tidak, akselerasi di semua sektor terus dipacu. Hal ini diungkapkan Bupati Joune Ganda saat bincang santai dengan sejumlah awak media di salah satu rumah kopi di bilangan jalan dekat Zero Points, Sabtu (03/09/22) kemarin.

Menurut Bupati Joune Ganda, komitmen dirinya dan wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung sebagaimana yang tertuang dalam Visi-Misi, merupakan amanat atau kepercayaan masyarakat yang telah diberikan.

“Kami dan pak Wakil Bupati terus mengakselerasi program-program. Dalam hal DPSP Likupang, kami beberapa kali mengikuti rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kemenparekraf RI baik di Jakarta maupun di Labuan Bajo sebanyak 2 kali. Sehingga, dapat dipastikan akan ada kucuran anggaran tahun 2023 yang nantinya diberikan oleh pemerintah Pusat. Apalagi, target pembangunan infrastruktur di Likupang tahun 2024 sudah seperti DPSP lainnya yang lebih dahulu,” jelas Bupati sambil menikmati kopi hitam dengan cemilan kue kenari gula merah khas Minut.

Ditambahkan Bupati JG, tahun 2023 dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, akan bangun Unit Pelayanan Teknis Pusat



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

(UPTP) di Kabupaten Minahasa Utara menjadi yang pertama dan satu-satunya terbesar di Sulawesi Utara.

“Anggaran pembangunan UPTP mencapai 400 Miliar Rupiah. Tentu ini untuk masyarakat Minut, sebab BLK ini juga akan menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang akan dinikmati masyarakat,” jelas Bupati sembari menyebut jika program tersebut merupakan proyek multiyear.

Demikian juga dengan Dana Insentif Daerah (DID). Kabupaten Minahasa Utara sebelumnya mendapat opini tidak wajar, di pemerintahan JG-KWL, kata Bupati Joune Ganda, dengan cepat memperbaiki tata kelola pemerintahan termasuk sistem keuangan daerah, sehingga tahun 2022 Minut boleh meraih opini WTP dari BPK RI.

“Karena pengelolaan keuangan yang semakin membaik, maka kami boleh meraih WTP sehingga bisa mendapatkan DID yang sebelumnya tidak. Dan itu jumlahnya sangat besar untuk menjawab kebutuhan serta merealisasikan program JG-KWL di masa kepemimpinan kami. Bahkan, KPK pun mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan kami sejak awal pemerintahan hingga kini sudah mencapai 1 setengah tahun,” tukas Bupati Joune Ganda sembari menyebut dirinya memberikan jaminan terkait kemitraan antara Pemkab Minut dengan media liputan Kabupaten Minahasa Utara.

Terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) ditambahkan Bupati, bahwa Itu juga menjadi indikator Kabupaten Minahasa Utara bisa mendapatkan bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan Carla Sigarlaki yang dihubungi mediamanado.com, mengaku jika Kabupaten Minahasa Utara telah memenuhi syarat untuk menerima Dana Insentif Daerah (DID).

“Setelah mendapat opini WTP dari BPK-RI, Minut telah memenuhi persyaratan mendapatkan DID. Memang diakui, rincian pagu dana transfer belum turun, sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah nilainya. Harus diakui juga, banyaknya capaian kinerja yang diperoleh, bukan hanya kinerja keuangan juga kinerja pemerintahan. Banyak juga prestasi lainnya seperti KLA, pengadaan barang dan jasa terkait E-Katalog Lokal masuk peringkat 5 besar Nasional. Tentunya prestasi tersebut menjadi pendobrak untuk Minut mendapat banyak dana pusat melalui DID,” tambah Kaban Carla, Minggu (04/09/22) sore tadi.(**)

Penulis: Sweidy Pongoh